

# PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

Nazar

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

## Abstract

*The objectives of the research were : (1) to identify and analyse the effect of regional finance accounting and internal control toward quality of financial reporting information at Regional Task Force Unit of Central Sulawesi Province, (2) to indentify and analyze the effect of regional finance accounting toward quality of financial reporting information at Regional Task Force Unit of Central Sulawesi Province, (3) to identify and analyze the effect of internal control toward quality of financial reporting information at Regional Task Force Unit of Central Sulawesi Province, (4) to identify and analyse the variables tahat dominantly affect the quality of financial reporting information at Regional Task Force Unit of Central Sulawesi Province. Based on the results of regression test, it was found adjust R Square = 0,610. The value showed the dependent variable can be explained by the implementation of regional finance accounting and internal control was 61 % while the remains 39 % influenced by other variabels which are not discussed in this research model.*

**Keywords:** *Implementation of Regional Finance Accounting, Internal Control, and Quality of Financial Reporting Information*

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggung jawaban laporan keuangannya. Sebelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggung jawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.

Laporan pertanggung jawaban keuangan harus dibuat oleh Kepala Daerah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001, tetapi hingga saat ini pemerintah daerah masih belum memiliki standar akuntansi pemerintah yang menjadi acuan di

dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya.

Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, peraturan tersebut menyangkut bahwa Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk

mewujudkan fungsi akuntansi, sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah, sehingga untuk memperbaiki penyusunan laporan keuangan daerah yang bersifat transparansi, akuntabel dan adil khususnya Propinsi Sulawesi Tengah dapat mengacu pada peraturan pemerintah tersebut.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya, berkaitan dengan pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, hal ini menyangkut permasalahan tentang manajemen resiko, audit internal, pengendalian internal, penganggaran, manajemen keuangan dan pelatihan untuk staf keuangan. Secara umum, permasalahan-permasalahan tersebut telah diakomodasi dalam paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara yang baru-baru ini telah diterbitkan oleh pemerintah.

Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya menggambarkan keseriusan jajaran pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa keuangan negara wajib

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ; (2) Apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ; (3) Apakah Pengawasan Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ; (4) Dari kedua variabel tersebut, variabel manakah yang dominan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ; (3) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (4) Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang dominan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satu-

an Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

**METODE**

Objek penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah, dimana jumlah SKPD sebanyak 49 Dinas Propinsi Sulawesi Tengah yaitu 147 orang.

Penelitian ini merupakan penelitian verifikasi (*verificative research*), yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel dan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal) terhadap variabel dependen (Kualitas Informasi Laporan Keuangan). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang berasal dari hasil tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan, kuesioner berisi 38 pertanyaan sedangkan data sekunder adalah data pendukung dari data primer, yaitu data-data bersifat dokumentasi dari objek penelitian. Sumber data sekun-

der diperoleh dari responden, SKPD Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan literatur.

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode hipotesis adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dimulai dari Uji Instrumen yang terdiri dari uji validitas, uji realibilitas (*Cronbach's Alpha*) dan uji korelasi (*Product Moment Pearson*, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji hipotesis dengan uji regresi berganda, analisis koefisien penentu dan uji F dan uji t.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Regresi Berganda**

Untuk menguji Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) dan Pengawasan Internal ( $X_2$ ) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan ( $Y$ ) maka digunakan analisis regresi berganda dengan cara menguji makna dari koefisien regresinya. Berikut hasil pengujian regresi dapat di lihat pada uraian di bawah ini:

*Uji Signifikan Simultan (F)*

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	39.147	2	19.574	115.099	.000 <sup>a</sup>
Residual	24.488	144	.170		
Total	63.636	146			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan\_Internal\_X2, Penerapan\_Ak\_Keu\_Daerah\_X1

b. Dependent Variable: Kualitas\_Inf\_Lap\_Keuangan\_Y

Sumber : Data Diolah 2012

Tabel 4. menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan nilai signifikan sebesar  $0,00 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan

Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

**Uji Parsial (t)**

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang dimasukkan dalam model, apakah mempunyai pengaruh secara parsial terhadap

variabel dependen. Untuk menentukan masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung digunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Parsial ( Uji t )**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
(Constant)	1.067	.226		4.713	.000			
Penerapan_Ak_Keu_Daerah_X1	.302	.057	.321	5.259	.000	.621	.401	.272
Pengawasan_Internal_X2	.484	.052	.565	9.268	.000	.736	.611	.479

a. Dependent Variable:

Kualitas\_Inf\_Lap\_Keuangan\_Y

Sumber : Data Diolah 2012

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut yaitu Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel (X<sub>1</sub>) menunjukkan nilai t<sub>hitung</sub> sebesar 5,259 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,00 dan variabel Pengawasan Internal sebagai variabel (X<sub>2</sub>) menunjukkan nilai t<sub>hitung</sub> sebesar 9,268 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,00. Kedua variabel tersebut mempunyai nilai signifikansi 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tersebut mempunyai pengaruh secara parsial atau masing-masing terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y).

Berdasarkan data yang telah disajikan pada Tabel 5 di atas maka dapat dibentuk model estimasi dengan menulis persamaan yaitu sebagai berikut:

$$Y = 1,067 + 0,302 (X_1) + 0,484 (X_2) +$$

Adapun asumsi dari hasil model estimasi persamaan dalam regresi berganda yaitu sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 1,067  
Dapat dijelaskan bahwa apabila variabel dependen yaitu Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel (X<sub>1</sub>) dan Pengawasan Internal sebagai variabel (X<sub>2</sub>) diasumsikan bernilai 0 maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah akan naik 1,067 apabila variabel lain dianggap konstan.
2. Nilai Koefisien Regresi Variabel Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel (X<sub>1</sub>) sebesar 0,302 berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) pada Satuan Kerja Pe-

rangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga jika Akuntansi Keuangan Daerah semakin baik maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan meningkat.

3. Nilai Koefisien Regresi Variabel Pengawasan Internal sebagai variabel ( $X_2$ ) sebesar 0,484, berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, se-

hingga jika Pengawasan Internal semakin baik maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan meningkat.

**Koefisien Determinasi**

Hasil nilai *adjust R-square* dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. Berikut tabel untuk koefisien determinasi di bawah ini:

**Tabel 6**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.784 <sup>a</sup>	.615	.610	.41238	1.754

Sumber: Data Diolah 2012 (Lampiran 12, hal 121)

Tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *adjust (R-Square/R<sup>2</sup>)* sebesar 0,615 yang kemudian dikoreksi kembali dengan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,610 menunjukkan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal menjelaskan Kualitas Informasi Laporan keuangan sebesar 61 %. Sedangkan selebihnya 39 % dijelaskan variabel-variabel lainnya diluar dan variabel dalam model penelitian.

**Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,00 yang dimana  $0,00 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel  $X_1$  dan variabel  $X_2$  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi hipotesis pertama yang menyatakan Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan In-

ternal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, dinyatakan, **terbukti**.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden pegawai yang menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Petausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menjawab bahwa untuk mengetahui Kualitas Informasi Laporan Keuangan hendaknya dilakukan penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal. Hal ini dapat dibuktikan dari kuesioner berdasarkan distribusi frekuensi dimana rata-rata mean menunjukkan kategori sangat tinggi.

Besarnya pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal terhadap Informasi Laporan Keuangan, ditunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah sangat penting bagi Pemerintah Daerah khususnya pada daerah Propinsi Sulawesi Tengah, dimana penerapan akuntansi keuangan daerah mencakup memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sehingga tidak terjadi

penyimpangan di dalamnya, selain itu dengan adanya penerapan akuntansi keuangan daerah dapat memberikan informasi mengenai cara memperoleh dan mengalokasikan sumber penerimaan yang sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang dilakukan, dan memberikan informasi mengenai suatu unit kerja dalam mendanai dan mencukupi kebutuhan kasnya. Selain penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan internal wajib dilakukan guna memberikan informasi laporan keuangan yang lebih akurat dikarenakan bahwa manfaat dari pengawasan internal, dalam melakukan setiap transaksi yang dikerjakan oleh pegawai harus mempunyai sikap yang cakap dan jujur, selain itu pengawasan internal dapat memperlancar tugas-tugas satuan kerja khususnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dengan adanya pengawasan internal dapat mengaplikasikan undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah maupun daerah guna memperoleh laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

### **Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa hasil uji nilai F menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,00, yang dimana  $0,00 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Jadi hipotesis kedua yang menyatakan Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, dinyatakan, **terbukti**.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi laporan keuangan selama satu periode tertentu

yang digunakan untuk membandingkan antara anggaran dan realisasinya, menilai kondisi keuangan entitas, menilai efektifitas dan efisiensi entitas dan menilai tingkat ketaatan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memperoleh laporan keuangan dibutuhkan penerapan sistem akuntansi terhadap Pemerintah Daerah agar di dalam melakukan pemeriksaan nantinya dapat terlihat jelas antara penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban, penyajian laporan keuangan dan penerapan akuntansi keuangan daerah salah satunya harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Khususnya Propinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan, namun tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Informasi akuntansi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan harus memenuhi unsur karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

### **Pengawasan Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pengujian hipotesis ketiga yang menunjukkan variabel Pengawasan Internal ( $X_2$ ) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 9.268 dengan nilai probabilitas signifikan yaitu sebesar 0,00 dimana  $0,00 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan Pengawasan Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Jadi hipotesis ketiga yang menyatakan Pengawasan Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, dinyatakan **terbukti**.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa implementasi dilapangan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan yang terdapat pada Pemerintah Daerah diperlukan Pengawasan internal pada SKPD khususnya propinsi Sulawesi Tengah. Sistem pengawasan internal sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung utama untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai kinerja yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang buruk dengan penyajian yang belum dapat diharapkan dengan secara wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh pengendalian internal.

Salah satu tujuan dari pengawasan internal adalah keandalan dari laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah ataupun pemerintah daerah harus bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya atas hasil penelitian pada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) dan Pengawasan Internal ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Variabel Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Lapo-

ran Keuangan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

3. Pengawasan Internal ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Variabel Pengawasan Internal ( $X_2$ ) adalah variabel yang dominan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, Anwer S, Ilobo, Gerald J. and Zhou, Jian. 2002. "Job Security and Income Smoothing: An Empirical Test of the Fudenberg and Tirole (1995) Model". <http://www.spk.uum.edu.my>
- Agus, Sartono dan Martono. 1996. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: PBPFE.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Terjemahan oleh Masri Maris. Jakarta: UI-Press.
- Gujarati N. Damodar. 2003. *Basic Econometric*. International Edition. Published by Mc. Grow-Hill Companies, Inc
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah). Jogjakarta: UPP AMP YK-PN.
- , 2007. *Akuntansi Keuangan daerah*. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaho, Joseph Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Lukman, Sampara dan Sugiyanto. 2001. *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*. Jakarta: LAN RI.
- Martono, Agus, Harjito. 2008. *Manajemen Keuangan*. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Ekonisia
- Masri, Sangarimbun dan Sofyan, Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Yogyakarta
- Muhammad, Gade; Said, Khaerul Wasif. 2005. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Edisi Kedua. Jakarta: FEUI
- Mardiasmo. 2000. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan otonomi Daerah 2001*. Seminar Isu terakhir Menjelang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001. Yogyakarta: HIM-MEP.
- 2001. *Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Murray, R. Spiegel. 2005. *Statistik (Outline of Theory and problems of Statistic)*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, Hg.Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi*. Cetakan Kesembilan. Yogyakarta: Kanisius.
- Nur, Indriantoro dan Bambang, Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Riduwan. 2008. *Metode dan Tehnik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Stefanuecu, Monica. 2006. "The Effect of SFAS 144 on Managers' Income Smothing Behavior". <http://www.accounting.eller.arizona.edu>.
- Urip, Santoso. 2000. *Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada,
- Whelen, Thomas L. dan J. David Hunger. 2002. *Strategic Management Business Policy*. 8<sup>th</sup> Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Widodo, Hg.Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi*. Cetakan Kesembilan. Yogyakarta: Kanisius.